



KOTA PONTIANAK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN  
KOTA PONTIANAK

NOMOR 08.a / DKUMP / TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK  
TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK,

- Menimbang
- a. bahwa dalam menjalankan rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2025-2029, perlu dilakukan penyusunan ukuran keberhasilan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan Kota Pontianak tentang Indikator Kinerja Utama di Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2025-2029;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);

13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 228);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 234);
15. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2025-2029.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Pontianak.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 22 September 2025

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA  
MIKRO DAN PERDAGANGAN  
KOTA PONTIANAK,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO  
DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK  
NOMOR 08.a/DKUMP/TAHUN 2025 TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI DINAS KOPERASI,  
USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK  
TAHUN 2025-2029

DEFINISI OPERASIONAL DAN RUMUS PERHITUNGAN  
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN  
KOTA PONTIANAK TAHUN 2025-2029

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kinerja Sektor Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Industri dalam Perekonomian Daerah	Proporsi Jumlah Usaha Mikro (%)			Indikator "Proporsi Jumlah Usaha Mikro (%)" mengukur persentase jumlah usaha mikro dibandingkan dengan total jumlah usaha di suatu wilayah atau sektor. Secara rinci: Usaha Mikro: Usaha yang biasanya memiliki karyawan sangat sedikit dan omset tahunan yang rendah, misalnya toko kelontong kecil atau warung makan. Indikator ini: Menghitung seberapa besar kontribusi usaha mikro dalam total jumlah usaha. Jika proporsi ini tinggi, berarti usaha mikro merupakan bagian dominan dari keseluruhan jumlah usaha.	Jumlah usaha mikro dibagi total seluruh usaha dikali 100%
		Rasio Kewirausahaan Daerah (%)			Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama.	Berusaha dibantu buruh tetap daerah dibagi Total angkatan kerja daerah dikali 100%
		Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB (%)			Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah	Total Volume Usaha Koperasi Daerah dibagi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dikali 100%
		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (Persentase)			Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB adalah besarnya sumbangan nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor perdagangan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah	PDRB Sektor Perdagangan dibagi Total PDRB dikali 100%
		Tingkat Inflasi ((%))			Kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu dalam wilayah provinsi tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Indeks Harga Konsumen adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi (Sumber: Badan Pusat Statistik)	Indeks Harga Konsumen pada periode sekarang dikurangi Indeks Harga Konsumen pada periode sebelumnya dibagi Indeks Harga Konsumen pada periode sebelumnya dikali 100%

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan ((%))			Kontribusi PDRB Industri Pengolahan adalah indikator yang menunjukkan besarnya peran atau sumbangan sektor industri pengolahan dalam pembentukan total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah pada periode tertentu	PDRB Sektor Industri Pengolahan dibagi Total PDRB dikali 100%
			Meningkatnya kontribusi Usaha Mikro dalam Perekonomian	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha (%)	Pembilang : Keseluruhan jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki kriteria Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap, lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap, sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha, sudah memiliki izin usaha (NIB) dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP, pengusaha memiliki pengalaman dalam berwira usaha, sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal, sudah membuat manajemen usaha seperti perencanaan usaha. Penyebut : Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro (modal usaha tidak lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan atau berdasarkan kriteria hasil penjualan tahunan tidak lebih dari Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).	Jumlah Usaha Mikro yang menjadi wirausaha dibagi Jumlah Usaha Mikro secara keseluruhan dikali 100%
			Meningkatnya Koperasi Berkualitas	Persentase Koperasi Berkualitas (%)	Mengukur Peningkatan Koperasi Berkualitas adalah Koperasi yang masih aktif melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 1 kali setahun yang ditandai dengan meningkatnya volume usaha dan asset	Jumlah Koperasi yang masih aktif melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 1 kali setahun yang ditandai dengan meningkatnya volume usaha dan asset Tahun N dibagi Jumlah Koperasi yang masih aktif melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 1 kali setahun sesuai kewenangan Kota dikali 100%
			Meningkatnya Nilai Tambah Perdagangan	Tingkat Kestabilan Harga Barang Pokok dan Barang Penting (%)	Tingkat stabilitas harga barang pokok dan barang penting adalah ukuran seberapa konsisten harga-harga barang yang stabil dalam periode waktu tertentu.	Harga Barang pokok dan barang penting dipasaran stabil per bulan dibagi harga Barang Pokok dan Barang penting per tahun dikali 100%
				Persentase Pemanfaatan Sarana Distribusi Perdagangan (%)	Persentase sarana distribusi perdagangan (Pasar Binaan) di wilayah Kota Pontianak yang dimanfaatkan, dikelola dan dikembangkan.	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar Binaan) yang dimanfaatkan dibagi total sarana Distribusi perdagangan (Pasar Binaan) yang tersedia dikali 100%

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
			Meningkatnya Daya Saing Industri	Persentase Pertumbuhan Jumlah Industri pengolahan (%)	Persentase peningkatan atau penurunan dari jumlah unit usaha di sektor industri pengolahan dalam periode tertentu	Jumlah Industri Pengolahan Tahun N - Jumlah Industri Pengolahan Tahun N-1 / dibagi Total Industri Sampai dengan N-1 dikali 100%



KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO  
DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK,

IBRAHIM

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO  
 DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK  
 NOMOR 08.a/DKUMP/TAHUN 2025 TENTANG  
 INDIKATOR KINERJA UTAMA DI DINAS KOPERASI,  
 USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK  
 TAHUN 2025-2029

DEFINISI OPERASIONAL DAN RUMUS PERHITUNGAN  
 PROGRAM KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2025-2029

NO	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri		Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Baru (%)	Pertumbuhan usaha mikro baru yang mengukur seberapa besar kenaikan usaha mikro baru tumbuh. Pertumbuhan usaha mikro baru mengacu pada kenaikan jumlah usaha mikro dari satu periode ke periode berikutnya.	Rumus = $(\text{Jumlah Usaha Mikro Tahun } (n) - \text{Jumlah Usaha Mikro Tahun } (n-1)) / \text{Jumlah Usaha Mikro Tahun } (n-1) \times 100\%$
		Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro
			Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang)	SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	Usaha Mikro yang difasilitasi Pemulihan	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pemulihan
			Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi (Unit Usaha)	Usaha Mikro yang terfasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pendampingan dan Bantuan Hukum	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pendampingan dan Bantuan Hukum

NO	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	Usaha Mikro yang Terfasilitasi Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	Unit Usaha Mikro Terdata	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan
2	Meningkatnya Daya Saing UMKM		Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya (%)	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Rumus = (Jumlah Usaha Kecil / Jumlah Total Usaha Mikro) x 100%
		Terlaksananya Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	Fasilitasi Usaha Mikro dalam Pengembangan Usaha	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pengembangan Usaha
			Jumlah yang Difasilitasi (Orang)	Fasilitasi usaha mikro dalam Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang Difasilitasi dalam hal Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	Fasilitasi usaha mikro dalam Inkubator Usaha	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Inkubator Usaha
3	Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	Rumus perbandingan antara jumlah kegiatan penunjang yang telah dilaksanakan terhadap jumlah kegiatan penunjang yang direncanakan dalam periode tertentu	Persentase capaian kinerja tiap kegiatan dibagi jumlah kegiatan penunjang
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

NO	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun
		Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

NO	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6
		Terkelolanya Administrasi Barang Milik Daerah dengan Baik	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
		Terkelolanya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah dengan Baik	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)	Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah
			Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (Dokumen)	Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah

NO	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6
		Terkelolanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
		Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

NO	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

NO	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
			Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam		Persentase Izin Usaha sesuai ketentuan (%)	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Simpan Pinjam	Rumus = (Penerbitan Izin koperasi / Jumlah Koperasi yang belum mempunyai izin) x 100%
		Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
5	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi		Persentase Kepatuhan Koperasi terhadap Regulasi yang Berlaku (%)	Menggambarkan sejauh mana kegiatan pengawasan dan pemeriksaan telah dilakukan terhadap koperasi, untuk memastikan kepatuhan koperasi terhadap regulasi yang berlaku	Rumus = (Jumlah Koperasi yang Patuh dan Cukup Patuh / Jumlah Koperasi yang diawasi Tahun n) x 100%
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Koperasi, KSP/USP	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan
6	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi		Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Rumus = (Jumlah koperasi Aktif / Total Koperasi yang terdata di ODS) x 100%

NO	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6
		Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan
7	Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian		Persentase Kenaikan Kualitas SDM Pengurus/ Pengawas Koperasi (%)	Persentase kenaikan kualitas SDM Pengurus/Pengawas koperasi setelah pelatihan. Yaitu koperasi yang aktif menyelenggarakan RAT, memiliki laporan keuangan yang sehat, dan menjalankan prinsip koperasi dengan baik.	Rumus = Jumlah peserta diklat yang bernilai baik / Total peserta diklat x 100%
		Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian
8	Meningkatnya Produktivitas Koperasi		Persentase meningkatnya koperasi yang Sehat (%)	Persentase jumlah koperasi yang berhasil memenuhi kriteria sehat atau cukup sehat	Rumus = (Jumlah Koperasi yang Sehat dan Cukup Sehat / Jumlah Koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan) x 100%
		Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan (Kelompok Masyarakat)	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Jumlah Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Unit Usaha)	Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya (Unit Usaha)	Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya (Unit Usaha)	Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya
			Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota
9	Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Berusaha		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (%)	Ukuran seberapa banyak pelaku usaha yang telah difasilitasi memperoleh izin pada tahun n sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku	Fasilitasi Perizinan yang terverifikasi (memenuhi persyaratan tahun n) sesuai ketentuan dibagi Pengajuan Perizinan tahun n x 100 %

NO	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6
		Terfasilitasinya Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik (laporan)	laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik
		Terfasilitasinya Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	Dokumen Tanda Daftar Gudang (berdasarkan data OSS RBA)	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (berdasar data OSS RBA)
		Terfasilitasinya Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik (yang masih berlaku hingga tahun n berdasarkan OSS RBA)	Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik (yang masih berlaku hingga tahun n berdasarkan OSS RBA)
		Terfasilitasinya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (yang masih berlaku hingga tahun n berdasarkan OSS RBA)	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (yang masih berlaku hingga tahun n berdasarkan OSS RBA)

NO	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6
		Meningkatnya Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan)	Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)
10	Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang yang Efisien, Merata dan Terintegrasi		Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya (%)	ukuran yang menunjukkan proporsi jumlah sarana distribusi perdagangan (pasar rakyat) yang telah dikembangkan dan/atau dikelola secara aktif oleh instansi terkait	$K = (a+b) \times 100\%$ K = Presentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0,5) b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya (nilai 0,5)
		Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan
			Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
			Jumlah Kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang (Kegiatan)	Kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang	Jumlah Kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang
			Jumlah laporan identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang (laporan)	laporan identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang (laporan)	Jumlah laporan identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang
		Terbinanya Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
11	Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		Persentase Koefisien variasi harga antar waktu (%)	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu per Komoditas Bahan Pokok	$KV = (S / X) \times 100\%$ , di mana S adalah simpangan baku harga dan X adalah rata-rata harga dari data harga antar waktu.

NO	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6
		Meningkatnya Jaminan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan Stok Bapokting pada tahun n)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan Stok Bapokting pada tahun n)
		Terlaksananya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan Perkembangan Harga Bahan Kebutuhan Pokok tahun n)	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan Perkembangan Harga Bahan Kebutuhan Pokok tahun n)
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
		Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	Laporan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%
12	Meningkatnya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor		Persentase Peningkatan Fasilitas Pengembangan Promosi dan Pemasaran Produk Ekspor (%)	Fasilitas Kegiatan Promosi dan Pemasaran Produk UMKM Orientasi Ekspor	Rumus = (Jumlah Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas tahun n / Jumlah Target Kegiatan Fasilitas Tahun n) x 100%
		Terselenggaranya Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	Produk Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Jumlah Produk Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)	Produk Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Jumlah Produk Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal

NO	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6
13	Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk		Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	perbandingan jumlah pengaduan konsumen yang berhasil ditangani atau diselesaikan oleh suatu organisasi/instansi dalam periode tertentu, dibandingkan dengan total jumlah pengaduan yang diterima dalam periode yang sama, dinyatakan dalam bentuk persentase	Rumus : (Jumlah Pengaduan yang Ditangani / Jumlah Pengaduan yang Masuk) x 100%
		Meningkatnya Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina
14	Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		Persentase peningkatan Fasilitas Pembinaan Promosi Dan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Menengah (%)	Perbandingan jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan promosi dan pemasaran penggunaan produk dalam negeri dibandingkan dengan total target kegiatan dan dinyatakan dalam bentuk persentase	Rumus = (Jumlah Realisasi Pelaksanaan Kegiatan tahun n/Jumlah Target Kegiatan Tahun n) x 100%
		Terlaksananya Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)	UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi
15	Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri		Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil (%)	Ukuran yang menyatakan seberapa besar peningkatan jumlah industri kecil dalam suatu wilayah pada periode waktu tertentu (biasanya tahunan), dibandingkan dengan jumlah industri kecil pada periode sebelumnya, dinyatakan dalam bentuk persentase.	Rumus : (Jumlah Industri Kecil Tahun N dikurangi Jumlah Industri Kecil Tahun N-1) / Jumlah Industri Kecil N-1) x100%
		Tersusunnya Dokumen RPIK	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri

NO	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
			- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen)	objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan
16	Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian		Persentase Kepatuhan Usaha Industri Kecil Terhadap Peraturan Perundangan yang Berlaku (%)	Ukuran yang menunjukkan seberapa besar proporsi usaha industri kecil yang telah memenuhi kewajiban operasional, dibandingkan dengan total jumlah industri kecil yang menjadi objek monitoring dalam periode tertentu, dinyatakan dalam bentuk persentase	Rumus = (Jumlah pelaku usaha yang memenuhi kewajiban operasional pada tahun ke-n / seluruh jumlah pelaku usaha yang dimonitoring) x 100%
		Meningkatnya Izin Industri yang Sesuai Ketentuan	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat

NO	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6
17	Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri		Ketersediaan Data Industri Kecil Menengah pada Aplikasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (%)	Ukuran yang menunjukkan sejauh mana data dan informasi mengenai industri kecil dan menengah (IKM) telah terinput dalam Aplikasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), baik oleh pelaku IKM sendiri maupun oleh instansi terkait.	Rumus = (Jumlah pelaku usaha yang memiliki akun SIINAS tahun N / seluruh jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pendampingan penginputan data pada SIINAS Tahun N) x 100%
		Tersedianya Informasi Industri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dokumen)	Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO  
DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK,





NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI 2024	TARGET TAHUN					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Meningkatnya Koperasi Berkualitas	Persentase Koperasi Berkualitas (%)	Persentase	84	84	84	85	85	87	87
			Meningkatnya Nilai Tambah Perdagangan	Tingkat Kestabilan Harga Barang Pokok dan Barang Penting (%)	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
				Persentase Pemanfaatan Sarana Distribusi Perdagangan (%)	Persentase	82,5	83,5	83,5	84,5	84,5	85	85,5
			Meningkatnya Daya Saing Industri	Persentase Pertumbuhan Jumlah Industri pengolahan (%)	Persentase	13,60	13,88	13,88	15,27	15,27	16,65	16,65

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO  
DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK,



LAMPIRAN IV  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO  
 DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK  
 NOMOR 08.a /DKUMP/TAHUN 2025 TENTANG  
 INDIKATOR KINERJA UTAMA DI DINAS KOPERASI,  
 USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK  
 TAHUN 2025-2029

TARGET TAHUNAN INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT  
 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2025-2029

NO	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	REALISASI 2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Baru	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	%	44,31	37,88	39,54	41,2	42,87	44,5 3	46,19
2	Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro		2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan								
3	Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	2.17.07.2.01.0002 - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	-	-	-	150	150	200	200
4	Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	2.17.07.2.01.0003 - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Unit Usaha	-	-	-	100	100	100	100

NO	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	REALISASI 2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Unit Usaha	100	100	850	900	900	900	900
6	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	2.17.07.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Orang	-	-	-	5	5	5	5
7	Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	2.17.07.2.01.0007 - Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Unit Usaha	-	-	-	50	50	75	50
8	Terfasilitasinya Pemulihan Usaha Mikro dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	2.17.07.2.01.0008 - Pemulihan Usaha Mikro	Unit Usaha	-	-	-	-	10	-	-
9	Terfasilitasinya Hak Kekayaan Intelektual Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi	2.17.07.2.01.0009 - Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Unit Usaha	-	-	-	10	10	15	10
10	Terfasilitasinya Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	2.17.07.2.01.0010 - Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro	Unit Usaha	-	-	-	-	5	-	-
11	Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	2.17.07.2.01.0012 - Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Unit Usaha	-	-	-	-	5	-	-

NO	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	REALISASI 2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	2.17.07.2.01.0013 - Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Unit Usaha	-	-	-	30	50	100	75
13	Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	2.17.07.2.01.0014 - Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Unit Usaha	-	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
14	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	2.17.07.2.01.0015 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	-	280	150	150	250	200
15	Meningkatnya Daya Saing UMKM	Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya	2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	%	7	7	7,3	7,5	7,7	8	8,2
16	Terlaksananya Pengembangan Usaha Mikro		2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil								
17	Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan SDM, dan/Kegiatan Lainnya	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	2.17.08.2.01.0002 - Pengembangan Usaha Mikro	Unit Usaha	200	200	620	630	650	650	650

NO	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	REALISASI 2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Terfasilitasinya Wirausaha Pemula Menjadi Wirausaha Mapan	Jumlah yang Difasilitasi	2.17.08.2.01.0003 - Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Orang	-	-	-	-	100	125	100
19	Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam Inkubator Wirausaha	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	2.17.08.2.01.0005 - Fasilitas Inkubator Usaha Mikro	Unit Usaha	-	-	-	-	5	-	-
20	Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan	2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100	100	100	100	100	100	100
21	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
22	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.17.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	2	2	2	2	2
23	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.17.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1
24	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.17.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1
25	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.17.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	6	6	6	6	6	6

NO	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	REALISASI 2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.17.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	5	5	5	5	5	5
27	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2.17.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1
28	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2.17.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Data	1	1	1	1	1	1	1
29	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.17.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	1	1	1	1	0	1	1
30	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	2.17.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Dokumen	5	5	5	5	5	5	5
31	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
32	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.17.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	65	65	65	65	65	65	65
33	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.17.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	-	-	-	1	1	1	1



NO	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	REALISASI 2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.17.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1
42	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2.17.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1
43	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2.17.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	1	1	1	1	1	1
44	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2.17.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	3	3	3	3	3	3	3
45	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.17.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	3	3	3	3	3	3	3
46	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.17.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	10	10	10	10	10	10	10
47	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	2.17.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1
48	Terkelolanya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah dengan Baik		2.17.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								
49	Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2.17.01.2.04.0001 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1

NO	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	REALISASI 2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	2.17.01.2.04.0002 - Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen	-	-	-	1	1	1	1
51	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	2.17.01.2.04.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan	-	-	-	1	1	1	1
52	Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	2.17.01.2.04.0004 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Dokumen	4	4	4	4	4	4	4
53	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	2.17.01.2.04.0005 - Pengolahan Data Retribusi Daerah	Laporan	4	4	4	4	4	4	4
54	Tersedianya Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	2.17.01.2.04.0006 - Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	4	4	4	4	4	4	4
55	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2.17.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	4	4	4	4	4	4	4
56	Terkelolanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
57	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2.17.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	2	2	2	2	2	2	2
58	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.17.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	18	18	18	18	18	18	18

NO	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	REALISASI 2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.17.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	4	4	4	4	4	4
60	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2.17.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	-	-	10	20	20	20	20
61	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.17.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	-	-	-	-	5	-
62	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah								
63	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.17.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	1	1	1	1	1	1
64	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.17.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	4	4	4	4	4	4	4
65	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.17.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket	4	4	4	4	4	4	4
66	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.17.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	4	4	4	4	4	4	4
67	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.17.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	4	4	4	4	4	4	4

NO	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	REALISASI 2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.17.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	12	12	12	12	12	12	12
69	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2.17.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	Paket	-	-	-	1	1	1	1
70	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.17.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	15	15	18	18	20	20	20
71	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.17.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2
72	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.17.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	12	12	12	12	12	12
73	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
74	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2.17.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	-	-	-	1	-	-	-
75	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2.17.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	-	-	-	-	-	-	1
76	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.17.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	Unit	-	-	10	-	-	-	-

NO	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	REALISASI 2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.17.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit			10	10	10	10	10
78	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	2.17.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud	Unit	-	-	1	-	-	-	-
79	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.17.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	33	45	-	1	-	-	-
80	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.17.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	10	13	-	1	-	-	-
81	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
82	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.17.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	-	1	1	1	1	1
83	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.17.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	12	12	12	12	12	12
84	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.17.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	-	-	-	1	-	-	-
85	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.17.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	12	12	12	12	12	12

NO	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	REALISASI 2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
87	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2.17.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	-	-	-	-	1	1	1
88	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.17.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	5	5	5	5	5	5	5
89	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2.17.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	Unit	-	-	-	-	-	5	-
90	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.17.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	40	40	40	54	54	54	54
91	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.17.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	4	4	4	4	4	4	4
92	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.17.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	-	-	-	-	-	5	-

NO	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	REALISASI 2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	Terfasilitasinya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.17.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	-	-	-	-	-	-	5
94	Meningkatnya Kualitas Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Izin Usaha sesuai ketentuan (%)	2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47
95	Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota		2.17.02.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota								
96	Terfasilitasinya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.17.02.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	-	1	1	1	1	1	1
97	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase Kepatuhan Koperasi terhadap Regulasi yang Berlaku	2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	%	13,33	13,33	14,44	15,56	16,67	17,78	18,89

NO	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	REALISASI 2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Koperasi, KSP/USP		2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota								
99	Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	2.17.03.2.01.0003 - Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	-	-	-	3	3	3	3
100	Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	512	512	474	500	500	500	500
101	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase	18,05	21,01	22,06	23,11	24,16	25,21	26,26
102	Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi		2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
103	Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	2.17.04.2.01.0001 - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	130	130	150	-	-	-	-



NO	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	REALISASI 2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	2.17.06.2.01.0003 - Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Kelompok Masyarakat	-	-	7	-	-	-	-
111	Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	2.17.06.2.01.0004 - Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	-	-	-	1	1	1	1
112	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	2.17.06.2.01.0005 - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	120	120	150	150	150	150	150
113	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	2.17.06.2.01.0007 - Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	-	-	-	-	40	40	40
114	Fasilitasi Pelaporan status kelembagaan dan/atau perkembangan usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	2.17.06.2.01.0008 - Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	-	-	-	-	40	40	40

NO	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	REALISASI 2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	2.17.06.2.01.0009 - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	-	-	50	-	-	-	-
116	Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Berusaha	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	%	100	100	50	60	70	70	80
117	Terfasilitasinya Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan		3.30.02.2.01 - Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan								
118	Tersedianya laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	3.30.02.2.01.0002 - Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	laporan	1	1	1	1	1	1	1
119	Terfasilitasinya Penerbitan Tanda Daftar Gudang		3.30.02.2.02 - Penerbitan Tanda Daftar Gudang								
120	Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	3.30.02.2.02.0001 - Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Dokumen	-	-	-	1	1	1	1



NO	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	REALISASI 2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	3.30.02.2.06.0003 - Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Laporan	-	-	-	-	-	1	-
127	Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang yang Efisien, Merata dan Terintegrasi	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	%	100	100	100	100	100	100	100
128	Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan								
129	Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3.30.03.2.01.0001 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	4	4	4	4	4	4	4
130	Tersedianya Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.30.03.2.01.0002 - Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	15	15	15	15	15	15	15
131	Terselenggaranya kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang	Jumlah Kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang	3.30.03.2.01.0003 - Pelaksanaan fasilitasi terkait Sistem Rersi Gudang di wilayah kabupaten/kota	Kegiatan	-	-	-	-	-	1	1
132	Tersedianya informasi terkait lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang	Jumlah laporan identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang	3.30.03.2.01.0004 - Identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota	laporan	-	-	-	-	-	1	1







NO	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	REALISASI 2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	3.30.06.2.01.0001 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Unit	18.000	18.00 0	11.00 0	11.50 0	12.00 0	12.5 00	13.00 0
151	Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	3.30.06.2.01.0002 - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Orang	-	-	-	-	-	20	25
152	Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan Fasilitasi Pembinaan Promosi Dan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Menengah	3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	%	100	100	100	100	100	100	100
153	Terlaksananya Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri								
154	Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	3.30.07.2.01.0005 - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	30	30	-	-	35	35	35
155	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	3.30.07.2.01.0006 - Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	75	75	50	50	70	70	70

NO	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	REALISASI 2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	%	23,39	18	18	23	23	24	27
157	Tersusunnya Dokumen RPIK		3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota								
158	Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	3.31.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-	1	1	1	1
159	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	3.31.02.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen	1	1	2	2	2	2	2
160	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3.31.02.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	1	1	4	1	1	1	1
161	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	3.31.02.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	1	1	2	2	2	2	2

NO	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	REALISASI 2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	2	4	4	2	2	2	2
163	Terlaksananya pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	3.31.02.2.01.0008 - Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Dokumen	1	2	2	2	2	2	2
164	Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian	Persentase Kepatuhan Usaha Industri Kecil Terhadap Peraturan Perundangan yang Berlaku	3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	%	30	30	30	35	40	45	50
165	Meningkatnya Izin Industri yang Sesuai Ketentuan		3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota								
166	Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan	3.31.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1



NO	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	REALISASI 2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	3.31.04.2.01.0001 - Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2
171	Terdiseminasi dan Terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS	3.31.04.2.01.0002 - Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS	Dokumen	-	-	-	-	-	1	1
172	Terpantau dan Dievaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	3.31.04.2.01.0003 - Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dokumen	-	-	-	-	-	1	1

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO  
DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK,

